

**Analisis Wacana Kritis Model Bourdieu
Cerita Wakil Walkot Surabaya VS Jan Hwa Diana
pada Berita Tempo 14 April 2025**

*Critical Discourse Analysis Using Bourdieu's Model
The Story of Deputy Mayor of Surabaya VS Jan Hwa Diana
In Tempo News, April 14, 2025*

¹Harun Maulana, ²Muchamad Aidil Fatriansyah, ³Nelvi Awlia Sari

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta¹²³

Email: hrnmaulana@gmail.com¹, aidil100601@gmail.com², nelviawlianelvigo@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika kekuasaan dan pertarungan simbolik dalam pemberitaan *Tempo* edisi 14 April 2025 yang berjudul “Cerita Wakil Wali Kota Surabaya VS Jan Hwa Diana” melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis model Pierre Bourdieu. Dalam kerangka teori Bourdieu, wacana dipahami sebagai arena (*field*) tempat aktor sosial saling berkompetisi menggunakan berbagai modal—modal simbolik, modal sosial, dan modal budaya—untuk mempertahankan atau merebut posisi dominan. Penelitian ini mengungkap bagaimana posisi dan strategi kedua tokoh utama dalam berita tersebut diproduksi, direpresentasikan, dan dipertarungkan melalui narasi media. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberitaan *Tempo* tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga memosisikan para aktor dalam konfigurasi relasi kuasa tertentu yang sarat kepentingan dan legitimasi simbolik. Artikel ini menegaskan bahwa media memiliki peran penting sebagai agen dalam arena sosial yang dapat memperkuat atau menggoyahkan dominasi melalui praktik representasi wacana.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis, Pierre Bourdieu, arena, modal, media, pemberitaan politik.

Abstract

This study aims to examine the dynamics of power and symbolic struggle in *Tempo* magazine's April 14, 2025 edition titled “The Story of Surabaya's Deputy Mayor vs. Jan Hwa Diana” using Pierre Bourdieu's model of Critical Discourse Analysis. Within Bourdieu's theoretical framework, discourse is seen as a *field* where social actors compete using various forms of capital—symbolic, social, and cultural—to maintain or challenge dominant positions. This research reveals how the positions and strategies of the two main figures in the news are produced, represented, and contested through media narratives. The analysis shows that *Tempo's* reporting not only delivers information but also positions the actors within a configuration of power relations laden with interests and symbolic legitimacy. The article asserts that the media plays a crucial role as an agent in the social field that can reinforce or disrupt dominance through discursive representation.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Pierre Bourdieu, field, capital, media, political reporting.

PENDAHULUAN

Sebagai institusi yang memiliki pengaruh besar dalam konstruksi sosial, media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk struktur kekuasaan simbolik. Seperti dijelaskan oleh Hendriati et al. (2024), media merupakan alat pengungkapan kekuasaan yang terstruktur, dan bahasa serta narasi di dalamnya dapat membongkar penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam lingkungan yang tertutup seperti institusi atau birokrasi. Dalam konteks yang sama, Kustian dan Yusup (2024) menegaskan bahwa analisis wacana kritis dapat mengungkap dinamika kekuasaan dan ideologi dalam realitas sosial, dengan fokus pada bagaimana narasi dibangun untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam masyarakat modern, konflik sosial tidak hanya terjadi di ranah material dan struktural, tetapi juga dalam wilayah simbolik—yakni wilayah yang menyangkut representasi, citra, kehormatan, dan pengakuan. Dalam konteks politik lokal, konflik tersebut seringkali melibatkan pertarungan antara aktor negara dan aktor non-negara, yang masing-masing berupaya mempertahankan atau membangun legitimasi mereka di ruang publik. Sejalan dengan (Rosya et al., 2023) Konstruksi sosial atas realitas merujuk pada suatu proses sosial yang mana individu yang secara berangsur-angsur menciptakan realitas yang dimiliki dan dialami melalui tindakan dan interaksi. Salah satu kasus yang relevan untuk dianalisis melalui pendekatan ini adalah konflik antara Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, dan seorang pengusaha lokal, Jan Hwa Diana, yang mencuat ke publik melalui media sosial dan pemberitaan daring.

Arena yang dimainkan oleh para tokoh tersebut yakni: Armuji dan Diana sangat menarik. Karena dalam ranah ini kedua posisi antara tokoh yang terlibat sama-sama memiliki apa yang dalam Istilah Bourdieu sebagai modal simbolik. Sehingga tentu saja, ketika berita ini mencuat penulis dalam penelitian ini merasa perlu untuk mengkaji bagaimana jika perseteruan ini dibawah ke dalam ranah akademis, melalui wacana kritis model Pierre bourdieu.

Peristiwa ini bermula dari sidak yang dilakukan Armuji ke perusahaan milik Jan Hwa Diana atas dugaan penahanan ijazah karyawan. Sidak tersebut direkam dan menjadi viral di media sosial, memicu respons keras dari Diana yang merasa citranya dicemarkan karena ditampilkan tanpa izin. Ia kemudian melaporkan Armuji ke Polda Jawa Timur atas dugaan pencemaran nama baik. Konflik ini berujung pada mediasi dan permintaan maaf, namun esensinya mencerminkan sebuah pertarungan simbolik dalam arena politik dan media.

Secara teoretis, konflik ini tidak dapat dipahami secara reduktif sebagai perseteruan personal atau pelanggaran hukum semata. Konflik ini merupakan contoh dari bagaimana aktor-aktor sosial berkompetisi untuk mengakumulasi dan mempertahankan modal simbolik dalam arena sosial tertentu, sebuah konsep yang dikembangkan oleh sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu. Modal simbolik mencakup segala bentuk kekuasaan yang diakui secara sah, seperti kehormatan, nama baik, kredibilitas, dan prestise yang memiliki nilai tukar dalam arena sosial tertentu.

Bourdieu (2020) mengatakan, kekuasaan simbolik merupakan bentuk kekuasaan yang bekerja secara halus namun efektif, karena beroperasi melalui mekanisme pengakuan, bukan paksaan. Dalam hal ini, baik Armuji maupun Diana sama-sama mempertaruhkan posisi simbolik mereka: Armuji sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, dan Diana sebagai pengusaha yang menuntut perlindungan terhadap reputasi pribadi dan bisnisnya. Kekuasaan simbolik adalah kekuasaan untuk membuat sesuatu diakui, diakui sebagai sesuatu, dan dengan demikian diterima (Bourdieu dalam Priyono, 2020).

Dalam konteks Indonesia, konflik yang berakar dari persoalan pencitraan dan legitimasi ini juga dapat dipahami melalui perspektif lokal mengenai relasi kuasa dalam masyarakat. Menurut Eep Saefulloh Fatah (2001), ruang publik Indonesia saat ini tengah mengalami transformasi yang ditandai dengan meningkatnya kekuatan media dan opini publik dalam menentukan nasib politik aktor-aktor publik. Media sosial, dalam hal ini, menjadi alat distribusi simbolik yang sangat strategis, terutama dalam membentuk persepsi publik terhadap legitimasi pejabat negara dan tokoh masyarakat. Menurut Fatah (2001) opini publik di Indonesia dewasa ini telah menjadi elemen kunci dalam penentuan arah kekuasaan. Politik pencitraan tidak bisa dihindari, dan karenanya penguasaan terhadap ruang simbolik menjadi semakin penting.

Selain itu, konflik ini juga merefleksikan dinamika kontestasi dalam masyarakat multikultural, di mana identitas etnis dan posisi sosial turut memengaruhi persepsi publik terhadap aktor sosial tertentu. Dalam masyarakat seperti Surabaya, yang memiliki keragaman budaya dan kelas, konflik antara aktor birokrasi dan pengusaha etnis Tionghoa dapat memunculkan lapisan-lapisan interpretasi yang kompleks. Hal ini sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat (2009) bahwa dalam masyarakat Indonesia, konflik sosial sering kali muncul ketika ada tumpang tindih antara struktur kekuasaan formal dan kekuasaan simbolik yang bersumber dari identitas kultural. Dalam Koentjaraningrat (2009) Relasi kuasa dalam masyarakat Indonesia tidak hanya dijalankan oleh sistem formal, tetapi juga oleh simbol-simbol sosial dan budaya yang dihidupi dalam keseharian masyarakat.

Dengan demikian, studi ini mencoba memahami konflik Armuji vs Jan Hwa Diana sebagai fenomena sosial yang tidak terlepas dari struktur relasi simbolik, interaksi antara habitus politik dan ekonomi, serta dinamika arena media yang memediasi pertarungan makna di ruang publik. Pendekatan Pierre Bourdieu digunakan untuk memetakan bagaimana modal simbolik digunakan, diklaim, dan diperebutkan oleh masing-masing aktor, serta bagaimana arena sosial membentuk medan perjuangan atas kehormatan dan legitimasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Bagaimana struktur arena sosial yang terbentuk dalam konflik antara Armuji dan Jan Hwa Diana dalam pemberitaan Tempo?
2. Modal apa saja yang digunakan oleh masing-masing pihak (Armuji dan Jan Hwa) dalam mempertahankan posisinya?
3. Bagaimana representasi “arena” tersebut dan bagaimana praktik pemberitaannya mereproduksi atau melawan kekuasaan simbolik?

Dalam memahami dinamika konflik sosial antara aktor politik dan non-politik, pendekatan teori Pierre Bourdieu memberikan kerangka konseptual yang komprehensif. Bourdieu memandang masyarakat sebagai struktur sosial yang terdiri atas berbagai arena (field), di mana individu atau kelompok bertarung untuk memperoleh dominasi, melalui berbagai jenis modal yang mereka miliki (Bourdieu, 2020). Dalam konteks ini, tiga konsep utama yang digunakan adalah habitus, modal, dan arena (field).

1. Habitus

Habitus adalah sistem disposisi yang tertanam dalam diri individu melalui pengalaman historis dan sosial. Habitus bukanlah sifat yang disadari, melainkan menjadi bagian dari kecenderungan bertindak dan berpikir yang membentuk praktik sosial (Bourdieu, 2020). Dengan kata lain, habitus adalah struktur generatif yang memungkinkan seseorang bertindak dengan cara tertentu berdasarkan latar belakang sosialnya.

Dalam kasus Armuji dan Jan Hwa Diana, perbedaan habitus antara aktor negara (Armuji) dan pelaku ekonomi (Diana) menjadi dasar terjadinya ketegangan simbolik. Armuji bertindak dengan habitus politik yang menekankan nilai pengawasan, legitimasi publik, dan otoritas institusional. Sebaliknya, Diana menunjukkan habitus kelas menengah pengusaha yang sensitif terhadap kehormatan, citra, dan kontrol terhadap ruang privat usaha. Habitus merupakan struktur yang dibentuk oleh sejarah, tetapi juga agen pembentuk sejarah karena melahirkan praktik-praktik sosial. (Bourdieu, 2020)

2. Modal: Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Simbolik

Bourdieu mengembangkan konsep modal menjadi lebih luas daripada sekadar kapital ekonomi. Ia mengidentifikasi empat bentuk modal yang dapat dipertukarkan dalam arena sosial:

- a) Modal Ekonomi: Aset material dan keuangan.
- b) Modal Budaya: Pengetahuan, keterampilan, gelar akademik.
- c) Modal Sosial: Jaringan sosial, koneksi, dan keanggotaan dalam kelompok.
- d) Modal Simbolik: Status, kehormatan, reputasi, dan pengakuan publik.

Modal simbolik sering kali menjadi bentuk kekuasaan yang paling halus namun efektif. Dalam konflik ini, Armuji menggunakan modal simbolik sebagai pejabat publik untuk memperlihatkan tindakan pro-rakyat melalui media. Diana, di sisi lain, merasa modal simboliknya (kepercayaan dan reputasi) terancam karena framing negatif yang ditimbulkan oleh video viral. Modal simbolik hanyalah modal lain (ekonomi, budaya, sosial) yang diakui secara sah oleh masyarakat dan dikonversikan ke dalam bentuk kehormatan (Bourdieu dalam Bungin, 2008).

3. Arena (Field)

Konsep arena atau *field* adalah medan pertarungan sosial yang relatif otonom, di mana aktor berkompetisi menggunakan berbagai modal yang dimiliki untuk memperoleh dominasi. Setiap arena memiliki logika internal, aturan main, dan struktur hierarki sendiri (Bourdieu, 1993).

Dalam konflik Armuji dan Diana, terdapat dua arena yang saling bersinggungan: arena politik (birokrasi lokal) dan arena media (terutama media sosial). Pertarungan di arena politik tidak dapat dilepaskan dari dinamika pencitraan, akuntabilitas publik, dan kepercayaan rakyat. Sementara itu, arena media menjadi medium distribusi modal simbolik secara masif dan cepat, sehingga framing dan persepsi publik menjadi faktor yang menentukan dalam mempertahankan atau menjatuhkan legitimasi sosial. Setiap arena adalah struktur sosial miniatur di mana kekuasaan didistribusikan secara tidak merata dan terus diperebutkan (Ritzer & Goodman, 2012).

Dengan ketiga konsep ini, Bourdieu menawarkan perspektif bahwa konflik bukan sekadar peristiwa permukaan, melainkan cerminan dari pertarungan simbolik dan struktural yang lebih dalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, simbolik, dan struktural dari konflik yang terjadi antara Armuji dan Jan Hwa Diana. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara intensif fenomena sosial dalam batasan waktu dan ruang tertentu.

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi media massa daring, termasuk portal berita seperti Tempo.co, Kompas.com, dan JPNN.com. Selain itu, juga digunakan kutipan langsung dari pernyataan publik Armuji dan Jan Hwa Diana dalam proses mediasi dan klarifikasi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- Studi dokumentasi terhadap berita daring yang melaporkan kronologi konflik.
- Analisis wacana media, dengan melihat bagaimana masing-masing aktor dikonstruksikan dalam narasi media.
- Kajian literatur teori Bourdieu, sebagai dasar untuk interpretasi konseptual terhadap data yang ditemukan.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema kunci dalam data berdasarkan kerangka teori Bourdieu. Tiga tema utama yang dikembangkan adalah: (1) konstruksi habitus aktor; (2) dinamika penggunaan modal simbolik; dan (3) posisi aktor dalam arena politik dan media.

Langkah-langkah analisis meliputi:

- Reduksi data berdasarkan kronologi dan isu utama.
- Kategorisasi tematik sesuai konsep Bourdieu (habitus, modal, arena).
- Interpretasi simbolik terhadap tindakan dan narasi media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Analisis Sosial Pierre Bourdieu

Dalam melihat fenomena konflik yang terjadi antara Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan pengusaha Jan Hwa Diana, teori Pierre Bourdieu menyediakan perangkat analisis sosiologis yang mampu mengungkap relasi kuasa yang tidak kasat mata. Pendekatan ini menekankan tiga konsep utama: habitus, modal, dan arena (field) sebagai instrumen analisis terhadap praktik sosial yang terjadi dalam realitas simbolik maupun struktural (Bourdieu dalam Priyono, 2009).

Konflik ini tidak hanya mengandung aspek personal atau hukum, tetapi merupakan bagian dari kontestasi modal simbolik dalam ruang publik yang dimediasi oleh media dan sistem politik lokal. Melalui pendekatan Bourdieu, teks-teks dalam berita dapat dibaca sebagai representasi dari praktik sosial aktor-aktor yang terlibat, serta medan perjuangan (arena) yang membentuk dinamika konflik (Widiyanto, S., dkk, 2023)

Habitus Politik dan Habitus Ekonomi

Dalam kerangka teoretis Bourdieu, aktor sosial tidak bertindak secara bebas tanpa batas, melainkan dalam kerangka *habitus* yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan merespons situasi sosial. Habitus Armuji sebagai pejabat publik dibentuk oleh praktik politik, birokrasi, serta orientasi terhadap pelayanan publik

dan citra moral. Armuji merasa memiliki legitimasi untuk melakukan sidak sebagai bentuk kontrol sosial, sesuatu yang dalam kerangka habitus birokrasi dianggap sebagai bagian dari tugas dan kekuasaan moralnya (Widiyanto, S. 2024). Di sisi lain, Jan Hwa Diana merupakan seorang pengusaha yang bergerak di sektor ekonomi dan memiliki habitus yang terbentuk dari nilai-nilai efisiensi, reputasi bisnis, serta penghargaan atas ruang privat. Ketika ruang usahanya diintervensi secara publik dan disorot media, Diana tidak hanya merespons dari aspek hukum, tetapi juga dari kerangka simbolik, yakni mempertahankan citra dan kehormatan.

Bourdieu menekankan bahwa ketika dua habitus yang berbeda bersinggungan dalam satu arena sosial, potensi konflik meningkat terutama ketika masing-masing merasa otoritas simboliknya terganggu. Konsep habitus merujuk pada sistem disposisi yang dibentuk oleh pengalaman hidup dan struktur sosial yang melekat pada individu. Habitus tidak bersifat statis, melainkan berfungsi sebagai pedoman bertindak dalam konteks sosial tertentu (Bourdieu, 2020).

Dalam teks berita Tempo.co (2025), Armuji digambarkan sebagai seorang pejabat yang melakukan sidak terhadap perusahaan yang diduga menahan ijazah karyawan. Sikap ini mencerminkan habitus pejabat negara yang berorientasi pada moralitas publik, transparansi, dan pengawasan sosial. Pernyataannya di media menyebut bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari “kepedulian terhadap hak rakyat” (Tempo.co, 2025). Tindakan tersebut menunjukkan internalisasi disposisi birokrasi formal yang membentuk respons moral dan legitimasi kekuasaan.

Sebaliknya, Jan Hwa Diana memproyeksikan habitus sebagai pengusaha, yang cenderung menekankan perlindungan reputasi, privasi usaha, dan pengendalian atas informasi. Ketika fotonya ditampilkan dalam video sidak, Diana menyatakan keberatannya karena merasa difitnah dan dituduh tanpa bukti. Ia menempuh jalur hukum sebagai upaya mempertahankan integritas sosialnya (Kompas.com, 2025). Ini merupakan bentuk resistensi terhadap praktik simbolik yang dianggap mencederai kehormatan sebagai aktor ekonomi. Habitus adalah sistem pemikiran dan tindakan yang membentuk cara individu menilai dirinya dan orang lain dalam konteks sosial tertentu (Priyono, 2009).

Modal Simbolik sebagai Sumber Pertarungan Makna

Konflik ini juga menunjukkan bagaimana modal simbolik menjadi sumber utama pertarungan antara Armuji dan Diana. Armuji memanfaatkan posisinya sebagai pejabat publik untuk menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat dengan menggambarkan perusahaan Diana sebagai tidak etis dalam memperlakukan karyawan. Melalui media sosial dan peliputan, tindakan tersebut memberi keuntungan simbolik berupa legitimasi moral dan dukungan publik.

Namun, dalam kacamata Bourdieu, pengakuan atas modal simbolik hanya efektif jika diterima oleh khalayak sebagai sah. Ketika publik atau pihak lain mempertanyakan legitimasi simbolik tersebut (misalnya dengan menuding bahwa tindakan Armuji merupakan pencemaran nama baik atau pencitraan politik), maka nilai modal tersebut bisa berbalik menjadi beban simbolik. Diana melakukan perlawanan dengan mengklaim bahwa dirinya telah dipermalukan di ruang publik tanpa dasar, yang merupakan bentuk penolakan terhadap validitas modal simbolik yang digunakan Armuji.

Armuji memanfaatkan modal simbolik sebagai pejabat publik dengan memosisikan dirinya sebagai pembela keadilan dan pelindung hak karyawan. Narasi yang digunakan media membingkai tindakan Armuji sebagai representasi pejabat yang “berpihak pada rakyat kecil”. Misalnya, dalam berita disebutkan: “*Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyatakan bahwa tindakan sidak adalah bentuk kepeduliannya terhadap para pekerja yang dirugika*” (Tempo.co, 2025).

Konversi modal antara simbolik dan hukum terlihat jelas ketika Diana memilih jalur pelaporan ke Polda Jatim. Ini mencerminkan bahwa konflik simbolik yang tidak terselesaikan dalam arena sosial dimigrasikan ke arena hukum. Dalam Bungin (2008) modal simbolik bekerja secara halus dan menjadi efektif ketika diterima secara sah oleh masyarakat.

Di dalam pemberitaan, Armuji memanfaatkan modal simbolik sebagai pejabat publik dengan memosisikan dirinya sebagai pembela keadilan dan pelindung hak karyawan. Narasi yang digunakan media membingkai tindakan Armuji sebagai representasi pejabat yang “berpihak pada rakyat kecil”. Misalnya, dalam berita disebutkan: “*Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyatakan bahwa tindakan sidak adalah bentuk kepeduliannya terhadap para pekerja yang dirugika*” (Tempo.co, 2025).

Praktik ini menegaskan bahwa dalam pertarungan sosial modern, reputasi dan kehormatan bukan hanya dilindungi secara moral, tetapi juga secara legal dan komunikatif. Kekuasaan simbolik hanya dapat berfungsi jika mereka yang tunduk mengakui otoritasnya sebagai sah (Bourdieu dalam Priyono, 2009).

Arena Politik dan Media sebagai Latar Konflik

Bourdieu (2020) menyatakan bahwa setiap arena memiliki aturan main tersendiri, tetapi sering kali arena saling beririsan. Dalam kasus ini, arena politik (di mana Armuji memiliki posisi dominan) bertemu dengan arena media (di mana Diana berupaya menegosiasikan identitasnya sebagai korban). Konsep arena (field) menurut Bourdieu adalah medan sosial yang relatif otonom, tempat aktor-aktor bertarung dengan menggunakan modal yang mereka miliki. Setiap arena memiliki logika dan aturan mainnya sendiri (Ritzer & Goodman, 2012).

Dalam kasus ini, arena utama yang membingkai konflik adalah arena politik lokal dan arena media digital. Arena politik memberikan Armuji posisi dominan struktural sebagai pejabat publik, namun arena media menciptakan ruang baru yang memungkinkan redistribusi kekuasaan simbolik.

Melalui tayangan video sidak, Armuji memperluas kekuasaannya di luar birokrasi formal ke dalam ranah digital, menjangkau warga secara langsung. Sementara Diana, yang tidak memiliki kuasa formal di arena politik, memanfaatkan arena hukum dan media untuk menyeimbangkan posisi simboliknya.

Teks berita mencerminkan bagaimana media berperan sebagai perpanjangan dari arena kekuasaan simbolik. Framing media tidak netral; pemilihan diksi, narasi, dan visualisasi aktor sangat menentukan bagaimana publik memaknai konflik tersebut. Arena bukan sekadar tempat berkumpulnya individu, tetapi merupakan struktur kekuasaan di mana masing-masing aktor berusaha mendominasi dengan modal yang dimilikinya (Priyono, 2009).

Tabel 01. Analisis Konflik Armuji vs Jan Hwa Diana dengan Pendekatan Pierre Bourdieu

No	Aspek Analisis	Armuji (Aktor Politik)	Jan Hwa Diana (Aktor Ekonomi)	Interpretasi Teoretis (Bourdieu)
1	Habitus	Habitus birokrasi: bertindak sebagai pengawas publik, mengutamakan moralitas jabatan.	Habitus pengusaha: menjaga citra, kontrol atas usaha, menjunjung privasi & reputasi.	Praktik sosial dipengaruhi oleh struktur disposisi masing-masing aktor.
2	Modal Simbolik	Memanfaatkan status pejabat publik dan narasi pembela rakyat untuk akumulasi legitimasi.	Menolak label negatif, mempertahankan kehormatan melalui pelaporan hukum dan klarifikasi media.	Perebutan pengakuan dan kehormatan di ruang publik melalui narasi dan tindakan sosial.
3	Arena (<i>Field</i>)	Arena politik & media digunakan sebagai sarana memperluas pengaruh dan legitimasi.	Arena hukum dan media digunakan untuk mengimbangi dominasi simbolik dari pejabat publik.	Arena sebagai ruang pertarungan yang memiliki logika distribusi kekuasaan sendiri.

4	Tindakan Kunci	Sidak dan publikasi video sebagai bentuk intervensi simbolik terhadap perusahaan.	Respon berupa laporan ke polisi dan pembelaan diri di media massa.	Konversi modal simbolik menjadi praktik simbolik yang berkonsekuensi hukum dan sosial.
5	Dampak Sosial	Peningkatan eksposur publik dan pencitraan sebagai figur pro-rakyat.	Simpati sebagian publik atas dugaan pencemaran nama baik; potensi kerugian simbolik & bisnis.	Kontestasi simbolik berdampak pada posisi sosial dan persepsi publik kedua aktor.

PENUTUP

Analisis konflik antara Armuji dan Jan Hwa Diana dalam kerangka Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa peristiwa ini tidak hanya dapat dimaknai sebagai konflik interpersonal atau kasus hukum, tetapi sebagai bentuk kontestasi sosial yang kompleks. Ketegangan ini merupakan hasil dari benturan habitus, perbedaan posisi dalam struktur sosial, serta perebutan modal simbolik dalam arena yang tumpang tindih: politik, hukum, dan media.

Habitus Armuji sebagai aktor negara menempatkannya dalam posisi dominan secara struktural, namun kekuasaan tersebut diuji oleh resistensi Diana yang memiliki modal sosial dan ekonomi sebagai pengusaha, serta upaya mempertahankan kehormatan simbolik melalui arena hukum dan media.

Dengan menggunakan pendekatan Bourdieu, studi ini memperlihatkan bahwa konflik sosial di ruang publik sering kali merupakan representasi dari pertarungan kekuasaan simbolik yang lebih dalam. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman struktural dan simbolik dalam membaca dinamika relasi kuasa kontemporer, terutama di level lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, Pierre. 2020. *Bahasa dan Kekuasaan Simbolik*. IRCiSOD: Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa: Realitas, Hegemoni, dan Kekuasaan*. Jakarta: Kencana.
- Fatah, Eep Saefulloh. (2001). *Ruang Publik dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hendriati, L., Hayati, S., & Mulyani, Y. S. (2024). *Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk di Berita Online Tempo dan Kompas tentang “Kasus Pencabulan di Panti Asuhan Darussalam An’Nur Tangerang”*. *Jurnal Psikolinguistik*, 1(4), 582–601. <https://journalwbl.com/index.php/jupensal/article/view/371>
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kustian, H., & Yusup. (2024). *Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk pada Interaksi Guru dan Siswa di Kelas*. *Jurnal Pendidikan Universal*, 1(5), 8–15.
- Priyono, Herry. (2009). *Pierre Bourdieu: Pengantar Komprehensif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rosya, Diva Evania, dkk. 2023. *Representasi Perempuan Dalam Berita Pelecehan Seksual*. *Jurnal aradigma*, Volume 12, Number 03, 2023. Unesa: Surabaya.
- Tempo.co. (2025). *Cerita Wakil Wali Kota Surabaya Armuji vs Jan Hwa Diana*. Diakses dari: <https://www.tempo.co/politik/cerita-wakil-wali-kota-surabaya-armuji-vs-jan-hwa-diana-1231069>
- Kompas.com. (2025). *Armuj: Konflik Pribadi Selesai, Tapi Kasus Ijazah Harus Lanjut*. Diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2025/04/14/153642078/>
- Widiyanto, S. (2024). *Pembelajaran Sastra Dan Budaya Melalui Buku Cerita Daerah Bagi Siswa Sekolah Dasar. Literasi: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pembelajarannya*, 8(1), 92-98.
- Widiyanto, S., Sunendar, D., Sumiyadi, S., & Permadi, T. (2023). *Pengenalan sastra untuk siswa taman kanak-kanak (studi kasus pada tradisi Gawai Dayak)*. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 467-478.